



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

# Dugaan Pemotongan Anggaran 20 Persen, Kejari Penyelidikan

**MUKOMUKO** - Daftar kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mukomuko bertambah panjang.

Ini setelah Kejari Mukomuko menerima laporan masyarakat soal adanya potongan anggaran 20 persen. Baik itu yang di kelola oleh Sekretariat daerah (Setdakab) Mukomuko, maupun yang dikelola masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mukomuko.

Saat ini laporan dugaan korupsi anggaran tersebut, Kejari Mukomuko telah memulai melakukan penyelidikan

"Kami telah menerima laporan dari masyarakat. Isi laporannya tentang dugaan pemotongan penggunaan anggaran di Setdakab maupun di OPD - OPD Pemkab Mukomuko. Besarnya diangka 20 persen, terjadi di tahun anggaran 2023 dan 2024," jelas Kajari Mukomuko, Rudi Iskandar SH, MH.

Kajari Mukomuko memastikan setiap laporan dari masyarakat yang dilengkapi bukti permulaan adanya korupsi, ditindaklanjuti.

Jaksa melakukan penyelidikan guna memastikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, ada tidaknya indikasi kuat ke arah tindak pidana korupsi.

"Pastinya kita tindaklanjuti untuk mencari kebenaran atas laporan tersebut, sehingga dugaan ini bisa diketahui secara pasti oleh masyarakat terkait kebenarannya," tegas Rudi Iskandar.

Kajari Mukomuko telah mengeluarkan surat perintah dimulainya penyelidikan, sehingga jaksa suda bisa memulai melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pemotongan anggaran 20 persen itu.

Kejaksanaan Negeri Mukomuko akan mulai melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari para-pihak yang mengetahui adanya pemotongan tersebut.

Baik itu pejabat yang berwenang dan pihak terkait lainnya. Termasuk nanti, jaksa melakukan pengeleda-



**WAWANCARA:** Kejari Mukomuko di dampingi Kasi Intel sesaat menghadiri undangan di lingkup Pemkab Mukomuko.

han ke OPD terkait untuk mendapatkan alat bukti.

"Kita akan lihat dulu seperti apa peristiwanya. Maka dari itu nanti akan banyak pihak yang kita panggil untuk dimintai keterangan," ujar Rudi Iskandar.

Dijelaskan Kajari, seperti kasus-kasus sebelumnya, bila ditemukan dua alat bukti cukup adanya pemotongan anggaran kegiatan yang bersumber dari APBD Mukomuko tahun 2023 dan 2024, yang itu berpotensi menyebabkan kerugian negara (KN), sudah pasti akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

"Intinya, laporan dari masyarakat terkait dugaan pemotongan anggaran itu kami tindaklanjuti. Untuk jadwal pemanggilan terhadap para pihak-pihak terkait, akan diagendakan lebih lanjut," katanya.

Ditanya berapa persentase dugaan pemotongan anggaran yang dilaporkan lembaga masyarakat tersebut. Kajari belum dapat menyampaikan lebih mendetail.

"Yang jelas, dari laporan itu ada pemotongan anggaran 20 persen. Pihak-pihak terkait akan kita panggil untuk dimintai keterangannya. Ini salah satu langkah yang akan dilakukan penyidik untuk mengetahui lebih lanjut kebenaran laporan tersebut. Sprindik kita telah terbit," tegas Kajari.

Selain laporan dugaan pemotongan anggaran Pemkab Mukomuko sebesar

20 persen, Kejari Mukomuko saat ini juga tengah fokus merampungkan penyelidikan dugaan korupsi aset dan penghasilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berangan Mulya, Kecamatan Teramang Jaya.

Dimana dalam kasus ini ikut menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Mukomuko Dr Abdiyanto, SH.

Terkait jabatan Abdiyanto sebagai Direktur BUMDes Berangan Mulya, ketika terjadi dugaan penyimpangan aset dan penghasilan BUMDes tersebut.

"Untuk dugaan Tipikor Bumdes Teramang Jaya sudah kita limpahkan berkas perkaranya ke bidang pidana khusus, selanjutnya bidang Pidana khusus yang akan menyelesaikan perkara ini," kata Kasi Intelijen Radiman SH.

Kasi intel menjelaskan, sebelumnya perkara ini hanya pulbaket. Kemudian ditingkatkan tim Intelijen ke penyelidikan setelah menemukan indikasi kuat terjadinya korupsi.

Penanganan kasus ini pun dilimpahkan Seksi Pidana Khusus (Pidsus) untuk penyelidikan lebih mendalam lagi.

"Berkaitan ada tidaknya alat bukti yang cukup akan perbuatan melawan hukum, itu nantinya akan dialami di bidang pidana khusus, jadi kita tunggu saja," ujarnya.

Ditingkat penyelidikan terkait perkara ini sejumlah saksi telah dimintai keterangan. Yang salah satunya Sekda Mukomuko Abdiyanto yang masih aktif menjabat saat ini.

Dalam pemeriksaan Kejari, Abdiyanto selaku saksi, terkait dirinya pernah menjabat Direktur BUMDes Berangan Mulya.

"Sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya. Termasuk Abdiyanto yang dimintai keterangan oleh penyidik sebagai Direktur BUMDes Berangan Mulya," ungkap Kajari.

Sedangkan sejumlah pihak lain yang sudah dimintai keterangan, diantaranya kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes. (pir)